

## Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi *Financial Distress* di Indonesia

Elfiyana<sup>1\*</sup>, Fefri Indra Arza<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [elfiyana694@gmail.com](mailto:elfiyana694@gmail.com)

---

### Abstract

*This study aims to determine the effect of Regional Government Characteristics (Regional Financial Independence, Degree of Decentralization, and Population) and Financial Factors (Efficiency Ratio, Growth Ratio, and Effectiveness Ratio) on financial difficulties in Regency/City local governments in Indonesia in 2017-2019. . This study uses secondary data from BPK and BPS. The sampling technique used is a simple random sampling technique. So that obtained a sample of 170 districts and 54 cities per year. Data analysis is multiple linear regression analysis. This study found that (1) regional financial independence had a significant positive effect on financial distress, (2) the degree of decentralization had a significant negative effect on financial distress, (3) the population had a significant negative effect on financial distress, (4) the efficiency ratio had a significant positive effect on financial distress, (5) the growth ratio has a positive and insignificant effect on financial distress, (6) the effectiveness ratio has a positive and significant effect on financial distress.*

**Keywords:** Local Government Finance; Characteristics of Local Government; Financial Factors; Financial distress.

### How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)

Elfiyana & Arza, F.I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (2), 425-437.

---

## PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang- Undang Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, memberikan perubahan yang cukup besar bagi Indonesia dimana konsekuensi penerbitan undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur daerah miliknya. Salah satu kewenangan tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur pendapatan serta belanja untuk menjalankan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Maka dari itu perlu diketahui kondisi keuangan pemerintah daerah agar tujuan utama terlaksananya otonomi daerah bisa tercapai.

Walaupun otonomi daerah sudah dilaksanakan dalam pemerintahan semenjak tahun 2001, tetapi pembangunan yang ada di daerah masih belum merata. Hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan keuangan daerah yang masih terkendala. Bersumber dari data kementerian keuangan, struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai pada tahun 2010 sampai 2014 dengan rata-rata sebesar 43,75%. Sedangkan belanja modal rata-rata hanya 23,92% (Republika.com, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih

banyak menggunakan anggaran untuk belanja pegawai daripada belanja modal. Padahal belanja modal itu digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan atau *financial distress*.

*Financial distress* dalam sektor publik adalah kurangnya kemampuan pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya baik aktivitas operasi, hutang, infrastruktur maupun pembangunan lainnya yang bertujuan memenuhi pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Jones dan Walker (2007) dalam Wulandari & Arza (2020) *financial distress* berarti ketidakmampuan dalam memberikan penyediaan layanan berdasarkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan yang disebabkan kurangnya keterampilan manajerial dan sumber daya organisasi saat memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam menghadapi tekanan *financial distress*, investasi yang digunakan pemerintah daerah adalah investasi publik yang tercermin dalam belanja modal.

Fenomena yang sering terjadi dan berhubungan dengan *financial distress* biasanya disebabkan oleh pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang dari 30% sehingga daerah itu belum bisa atau belum mampu melakukan investasi dengan baik dalam semua kegiatan pemerintahan yang bertujuan memberikan layanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat atau publik. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwasanya standar mutu yang sudah ditetapkan kepada tiap-tiap daerah untuk menghadapi *financial distress* ditetapkan minimum 30% untuk masing-masing belanja modal tiap daerah. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga dijelaskan bahwa persentase belanja modal yang menjadi tolak ukur *financial distress* dalam sebuah daerah harus berporsi minimal 30%. Salah satu contoh fenomena yang terjadi dapat kita lihat pada Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 sampai 2018 dimana komposisi belanja modal masih dibawah 30%. Angka yang dicapai untuk belanja modal hanya 22,55% dari total belanja daerah. Hal tersebut bisa kita ketahui dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diterbitkan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, hanya ada 3 kabupaten yang memenuhi standar realisasi belanja modal yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kepulauan Mentawai dengan persentase lebih dari 30%.

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan banyaknya faktor atau indikator yang mempengaruhi *financial distress* pemerintah daerah. Salah satunya penelitian Syurmita (2014), Wulandari et al (2020), Carolina et al (2017) yang menemukan beberapa indikator yang mempengaruhi kondisi *financial distress*. Indikator tersebut dikelompokkan pada dua faktor yaitu faktor non keuangan atau karakteristik pemerintah daerah dan faktor keuangan atau *financial*. Dalam penelitian ini menggunakan indikator karakteristik pemerintah daerah dan faktor keuangan dimana karakteristik pemerintah yang digunakan antara lain kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, dan jumlah penduduk. Sedangkan untuk faktor keuangan digunakan rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas.

Karakteristik dari sebuah pemerintah bisa memberikan gambaran tentang cara pemerintah itu dalam membuat kebijakan, menjalankan kebijakan itu, dan dapat menentukan apakah kinerja pemerintah tersebut telah selaras dengan tujuan dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya. Sedangkan faktor keuangan yang bisa mempengaruhi *financial distress* bisa kita lihat pada LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Standar akuntansi pemerintah yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan tujuan utama dari LKPD yakni menyajikan informasi dari posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari sebuah entitas, pelaporan bagi pemakai dalam membuat dan melakukan evaluasi terhadap keputusan alokasi sumber daya untuk memberikan pelayanan publik agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Peran faktor keuangan penyelenggaraan pemerintahan sangat penting karena fungsi dari

pemerintah daerah tidak dapat terlaksana dengan efisien dan efektif tanpa adanya biaya yang mencukupi dalam memberikan pelayanan pembangunan. Maka dari itu keuanganlah yang menjadi salah satu dasar kriteria agar diketahui kemampuan daerah saat mengurus dan mengatur rumah tangganya secara nyata. Kemampuan yang dimiliki faktor keuangan saat penyelenggara pemerintahan dapat diukur menggunakan kinerja keuangan daerah (Mahmudi, 2016).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap *financial distress* yang dilakukan Syurmita (2014) ditemukan bahwa populasi penduduk, solvabilitas dan pemekaran wilayah berpengaruh positif terhadap *financial distress* dan derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan memiliki arah negative signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Hal ini berbeda dengan penelitian Sari & Arza (2019) yang menambah variabel lain yaitu rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, luas wilayah, dan opini audit mendapatkan hasil semua variabel berpengaruh signifikan kecuali rasio pertumbuhan yang berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*.

Berdasarkan inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu maka perlu adanya penelitian baru terkait *financial distress*. Melihat penelitian di sektor publik mengenai *financial distress* masih dalam jumlah sedikit dan penelitian ini lebih banyak dilakukan di sektor swasta yang dimana hal tersebut dibuktikan dengan perkembangan penelitian yang terkait *financial distress* di sektor publik lebih sedikit daripada di sektor swasta. Penelitian ini penting dilakukan karena jika pemerintah daerah dalam keadaan atau sedang mengalami *financial distress*, maka kondisi tersebut akan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan akhirnya akan menyebabkan stagnasi dalam taraf kesejahteraan masyarakat, dan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut karena tidak dibantu oleh pelayanan publik yang memadai.

## **REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### ***Agency Theory***

Dalam teori agensi ada dua pihak yang mengadakan suatu kontrak atau kesepakatan, yaitu pihak *principal* yang memberikan kebijakan dan pihak *agent* yang menerima suatu kebijakan (Halim dan Abdullah, 2006). Organisasi sektor publik memiliki tujuan yaitu memberikan pelayanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan secara benar dan tepat, penyesuaian anggaran yang benar dan belanja modal yang dialokasikan secara tepat dan benar dalam pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dan penjelasan ini sesuai dengan pendapat Lane dan Erik (2000) dalam ( Halim & Abdullah, Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah, 2015). Masalah keagenan yang timbul disebabkan bahaya moral dan proses seleksi terhadap *agent* yang salah dimana masyarakat lebih cenderung tidak mengetahui karakteristik asli maupun tujuan dari *agent* tersebut. Masyarakat memilih agar tujuan mereka tercapai, tetapi pemerintah memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri yang biasanya sering dilakukan saat penyusunan biaya anggaran.

### **Teori Ketergantungan Sumber Daya**

Emerson (1961) dalam Sari et al. (2019) menjelaskan bahwa teori ketergantungan sumber daya menerangkan keterhubungan antara konsep ketergantungan dan konsep kekuasaan dalam sebuah organisasi. Ketergantungan adalah kesatuan utama dari kekuasaan. Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal mengurus dan mengelola daerah masing-masing. Dalam sektor publik teori ini mendefinisikan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat

kepada pemerintah pusat dan menjelaskan kekuasaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur daerahnya.

### **Teori Kebangkrutan**

Sartika (2016) menjelaskan bahwa kebangkrutan diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam memperoleh laba atau pendapatan saat menjalankan aktivitas operasionalnya sehingga menyebabkan entitas mengalami kesulitan dalam sumber dana. Tidak mampunya pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan kualitas layanan masyarakat maupun dalam pemenuhan layanan publik, hal itu juga dapat dilihat sebagai kebangkrutan di pemerintah daerah atau organisasi publik (Mastuti et al, 2013).

### ***Financial Distress***

*Financial distress* merupakan keadaan dimana pemerintah tidak bisa memberikan layanan kepada masyarakat sesuai standar yang sudah ditetapkan (Jones and Walker, 2007). Hal tersebut diakibatkan oleh pemerintah yang mengalami kekurangan dana dan pendapatan yang dihasilkan dalam daerah tersebut serta pengeluaran belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak mengalami keseimbangan yang berkelanjutan. *Financial distress* yang dialami pemerintah daerah diartikan sebagai ketidakmampuan pemerintah pada setiap aktivitas yang didasarkan pada kebijakan yang dimilikinya. Baik dalam kebijakan atas aktivitas operasi, pembangunan, utang ataupun infrastruktur lainnya dalam hal melakukan pemenuhan tujuan pelayanan untuk masyarakat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Cara melihat kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat yaitu dengan melihat bagaimana investasi yang dilakukan pemerintah dalam hal pemberian pelayanan infrastruktur berkualitas. Investasi publik ini merupakan cara yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi tekanan dari *financial distress* yang tercermin dalam belanja modal.

### **Karakteristik Pemerintah Daerah**

Karakteristik pemerintah daerah bisa dilihat kepada faktor eksternal dan internal yang ada pada daerah tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan karakter daerah tersebut agar belanja modal dapat dialokasikan secara efisien dan efektif dalam investasi infrastruktur daerah. Belanja modal yang persentasenya dialokasikan semakin kecil maka akan menyebabkan atau berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelayanan yang diberikan kepada publik. Belanja modal yang dialokasikan bisa ditentukan bagaimana karakteristik pemerintah daerah itu saat menjalankan otonomi daerahnya. Karakteristik dari sebuah pemerintah bisa memberikan gambaran tentang cara pemerintah itu dalam membuat kebijakan, menjalankan kebijakan itu, dan dapat menentukan apakah kinerja pemerintah tersebut telah selaras dengan tujuan dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya.

### **Faktor Keuangan**

Rasio keuangan didefinisikan sebagai rasio yang bisa meramalkan bagaimana kondisi keuangan sebuah organisasi serta hasil dari usaha pada masa yang mendatang. Rasio keuangan tidak hanya bisa digunakan pada sektor swasta namun juga bisa digunakan untuk melihat kesehatan keuangan dari pemerintah daerah, khusus saat melakukan pertanggung jawaban otonomi daerah yang sudah diterima. Pada sektor publik analisis rasio keuangan terkhusus pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) belum banyak dilakukan sehingga pengukurannya secara teori belum terdapat kesepakatan bulat. Akan tetapi rasio keuangan bisa diterapkan oleh organisasi sektor publik untuk melihat kesehatan keuangan pemerintah daerah agar terbentuknya pemerintahan yang demokratis jujur, efektif, efisien dan transparan walaupun hal yang diterapkan berbeda dengan perusahaan atau organisasi swasta.

### **Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap *Financial Distress***

Kemandirian keuangan dari suatu daerah merupakan kontribusi atau kemampuan dari PAD atau Pendapatan Asli Daerah yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhannya dalam upaya melakukan pelaksanaan pembangunan daerah, melakukan pelaksanaan sistem pemerintahan dan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat (Rukmana, 2013). Daerah yang memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya ditandai dengan semakin meningkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan lebih banyaknya pengalokasian belanja modal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga peluang terjadinya *financial distress* semakin kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan rendah.

**H<sub>1</sub>** : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

### **Hubungan Derajat desentralisasi terhadap *Financial Distress***

Derajat desentralisasi menggambarkan seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah karena pendapatan asli daerah merupakan tingkat kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah saat melaksanakan berbagai kegiatan untuk daerah yang dipimpinnya. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka derajat desentralisasinya juga akan tinggi. Hal itu disebabkan oleh pendapatan asli daerah lebih banyak digunakan dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan dan dapat dilaksanakan kebijakan untuk pengoptimalan belanja modal. Pemerintah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi, maka peluang terjadinya *financial distress* akan berkemungkinan kecil juga terjadinya. Karna pengalokasian PAD saat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih banyak diandalkan.

**H<sub>2</sub>** : Kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam pelaksanaan desentralisasi berpengaruh signifikan negatif kepada *financial distress*.

### **Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap *Financial Distress***

Jumlah penduduk merupakan sebuah pengukuran dari kompleksnya suatu daerah yang berarti semakin meningkatnya jumlah penduduk maka tuntutan atas pelayanan publik oleh masyarakat juga akan meningkat karena masyarakat memiliki peran penting sebagai pengawas dari kinerja pemerintah yang dirasakan melalui optimalisasi belanja modal. Penelitian ini juga menduga dengan banyaknya jumlah penduduk di kabupaten dan kota maka peluang terjadinya *financial distress* juga meningkat yang disebabkan atas tuntutan atas pelayanan publik yang lebih baik oleh masyarakat disbanding dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit (Sari & Arza, 2019).

**H<sub>3</sub>**: Jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap kondisi *financial distress*.

### **Hubungan Rasio Efisiensi Terhadap *Financial Distress***

Menurut Lazyra (2016) efisiensi memiliki hubungan dengan kegiatan operasional selama satu periode yang dilaksanakan pemerintah daerah. Dan kegiatan operasional tersebut dikatakan efisien jika dana atau sumber dana yang digunakan serendah-rendahnya yang diterapkan dalam belanja daerah. Rasio efisiensi yang semakin kecil maka menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah bagus. Hal itu disebabkan pemerintah daerah bisa menekan dana yang digunakan pada saat membiayai kegiatan operasional atau yang berhubungan dengan belanja langsung. Kecilnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah daerah bisa menekan biaya operasional yang dibandingkan dengan realisasi pendapatan riil daerah. Dan dana tersebut bisa dialihkan kepada belanja modal untuk memberikan pelayanan infrastruktur atau pembangunan untuk masyarakat (Mahmudi, 2016). Sehingga indikasi terjadinya *financial distress* bisa dihindari dan terhindar dari kebangkrutan (Subiyanto & Halim, 2008).

**H<sub>4</sub>** : Rasio efisiensi berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*.

### **Hubungan Rasio Pertumbuhan Terhadap *Financial Distress***

Rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai belanja modal, pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah dan diikutinya belanja operasi yang semakin rendah, maka pertumbuhannya adalah positif. Yang berarti daerah tersebut mampu meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhannya ke periode selanjutnya dari periode sebelumnya (Halim, 2012). Rasio pertumbuhan yang positif yang dimiliki pemerintah daerah yaitu berarti daerah tersebut bisa melakukan alokasi dengan baik belanja modal yang dimiliki dan bisa melebihi standar ketetapan dan bisa menekan belanja operasi. Hal tersebut menandakan pemerintah daerah mampu untuk mengadakan investasi kepada infrastruktur dan pembangunan untuk masyarakat dan juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mengalami *financial distress*.

**H<sub>5</sub>** : Rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

### **Hubungan Rasio Efektivitas Terhadap *Financial Distress***

Lazyra (2016) menyebutkan pemerintah daerah yang memiliki rasio efektivitas yang tinggi berarti kemampuan rill daerahnya bagus. Sehingga berdampak baik pada kinerja keuangan yang dimiliki pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang baik oleh pemerintah daerah berarti pemerintah tersebut bisa melakukan perealisasi pendapatan rill daerah dengan baik. Dan juga pemerintah akan terhindar dari indikasi terjadinya *financial distress*.

**H<sub>6</sub>** : Rasio efektivitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk riset asosiatif yang merupakan penelitian untuk melakukan analisis hubungan variabel yang satu dengan variabel lainnya (Umar, 2003:30). Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia yang terdiri atas 34 Provinsi dipilih sebagai populasi data dalam penelitian ini. Terdapat 508 kabupaten dan kota. Peneliti menggunakan *probability sampling* sebagai metode yang digunakan dalam pemilihan sampel. Menurut Sugiyono (2012) *probability sampling* merupakan teknik yang memberikan peluang yang sama bagi semua unsur anggota (unsur) populasi agar bisa dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini digunakan teknik penyampelan acak sederhana atau *simple random sampling*. Ukuran dalam pengambilan jumlah sampel digunakan rumus slovin.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau diperoleh dari media perantara atau pihak lain (Sugiyono, 2017). Data dalam penelitian ini menggunakan *pooled data* yang merupakan kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section* yang berupa data laporan keuangan pemerintah daerah, APBD yang dijelaskan oleh (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri) dan data jumlah penduduk yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2017-2019.

### **Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Penelitian ini menggunakan *financial distress* sebagai variabel dependen dimana pengukuran yang digunakan yaitu dengan membandingkan belanja modal pemerintah daerah dengan total belanja daerah. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, jumlah penduduk, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara PAD dan total belanja. Derajat desentralisasi diukur dengan membandingkan PAD dengan

total pendapatan. Untuk jumlah penduduk diukur dengan menggunakan jumlah populasi penduduk tersebut. Rasio efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Rasio pertumbuhan diukur dengan membandingkan hasil pengurangan (PAD tahun sekarang dengan PAD tahun sebelumnya) dengan PAD tahun sebelumnya. Dan rasio efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

**Tabel 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Financial Distress	672	0.07	0.48	0.2022	0.05813
Kem Keuangan Daerah	672	0.02	0.56	0.1365	0.09781
Derajat Desentralisasi	672	0.02	0.54	0.1358	0.0979
Jumlah Penduduk	672	33978	5965410	691121	769427.57
Rasio Efisiensi	672	0.72	1.4	0.995	0.04362
Rasio Pertumbuhan	672	-0.97	14.14	0.141	0.63223
Rasio Efektivitas	672	0.78	1.47	1.0239	0.08049
Valid N (listwise)	672				

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan variabel *financial distress* sebagai variabel dependen memiliki rata-rata 0,20 dengan *financial distress* tertinggi adalah 0,48 serta yang terendah adalah 0,07 dan standar deviasi 0,058. Variabel kemandirian keuangan daerah memiliki rata-rata 0,14 dengan kemandirian tertinggi adalah 0,56 dan kemandirian terendah adalah 0,02 dan standar deviasinya yaitu 0,098. Variabel derajat desentralisasi memiliki nilai rata-rata yaitu 0,14 dengan derajat desentralisasi tertinggi adalah 0,54 dan derajat desentralisasi terendah adalah 0,02 dengan standar deviasi 0,98. Variabel jumlah penduduk memiliki rata-rata yaitu 691.120,9 dengan jumlah penduduk tertinggi adalah 5.965.410 dan terendah adalah 33.978 dengan standar deviasi yaitu 769.427,57.

Variabel rasio efisiensi memiliki rata-rata yaitu 0,995 dengan rasio efisiensi tertinggi 1,40 dan rasio terendah 0,72 dengan standar deviasi yaitu 0,044. Rasio pertumbuhan memiliki rata-rata 0,14 dengan rasio pertumbuhan tertinggi yaitu 14,14 dan rasio pertumbuhan terendah adalah -0,97 dengan standar deviasi 0,63. Variabel rasio efektivitas memiliki rata-rata 1,02 dengan rasio efektivitas tertinggi adalah 1,47 dan rasio efektivitas terendah adalah 0,78 dengan standar deviasi 0,80.

### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memberikan kepastian bahwa data yang digunakan sudah terdistribusi normal. Untuk memastikan data terdistribusi dengan normal, maka dilakukan uji *kolmogorov-smirnov*.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		672
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.00E+00
	Std. Deviation	0.05627366
	Absolute	0.052
Most Extreme Differences	Positive	0.052
	Negative	-0.038
Kolmogorov-Smirnov Z		1.34
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.055

Berdasarkan hasil uji normalitas dari tabel di atas didapatkan bahwa nilai *Asymp Sig (2-tailed)* adalah 0,055. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan dalam uji normalitas dalam penelitian ini lebih besar dari nilai sig. maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini terdistribusi normal sehingga data layak untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat korelasi antara variabel independen dalam penelitian. Model regresi yang dikatakan baik jika tidak ada atau tidak terjadinya multikolinieritas.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kem Keuangan Daerah	0.145	6.899
LN Derajat Desentralisasi	0.142	7.06
LN Jumlah Penduduk	0.655	1.527
Rasio Efisiensi	0.927	1.078
Rasio Pertumbuhan	0.994	1.006
Rasio Efektivitas	0.882	1.134

a. Dependent Variable: Financial Distress

Menurut hasil uji multikolinieritas pada Tabel 3 diperoleh hasil bahwa semua variabel independen (X) dalam penelitian ini memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Berikut rinciannya ; untuk variabel kemandirian keuangan daerah memiliki nilai VIF 6,899 dan nilai *tolerance* yaitu 0,145. Variabel derajat desentralisasi memiliki nilai VIF sebesar 7,060 dan *tolerance* 0,142. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai VIF 1,527 dan *tolerance* yaitu 0,655. Variabel rasio efisiensi memiliki nilai VIF yaitu 1,078 dan nilai *tolerance* yaitu 0,927. Variabel rasio pertumbuhan memiliki nilai VIF 1,006 dan *tolerance* yaitu 0,994. Variabel rasio efektivitas memiliki nilai VIF 1,134 dan *tolerance* yaitu 0,882. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas.



### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual untuk setiap pengamatan pada setiap model regresi. Uji *glejser* merupakan cara untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam sebuah penelitian.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.006	0.045		0.136	0.892
Kem Keuangan Daerah	0.087	0.033	0.262	2.643	0.092
LN Derajat Desentralisasi	-0.017	0.005	-0.328	-3.27	0.096
LN Jumlah Penduduk	-0.004	0.002	-0.122	2.614	0.061
Rasio Efisiensi	0.045	0.029	0.061	1.547	0.122
Rasio Pertumbuhan	0.004	0.002	0.074	1.953	0.051
Rasio Efektivitas	-0.007	0.016	-0.018	0.439	0.661

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Berdasarkan hasil pengujian di atas, menghasilkan uji heteroskedastisitas dengan nilai sig besar dari 0,05 yaitu kemandirian keuangan daerah memiliki nilai sig 0,092, derajat desentralisasi memiliki nilai sig 0,096, jumlah penduduk memiliki nilai sig 0,061, rasio efisiensi memiliki nilai sig 0,122, rasio pertumbuhan memiliki nilai sig 0,051, dan rasio efektivitas memiliki nilai sig 0,661.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Model analisis regresi linier berganda bertujuan dalam melihat pengaruh atau hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan Tabel 5 dapat dianalisis model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -0,122 + 0,484X_1 - 0,063X_2 - 0,018X_3 + 0,257X_4 + 0,004X_5 + 0,099X_6$$

Keterangan :

$Y$  = *Financial distress*

$X_1$  = Kemandirian keuangan daerah

$X_3$  = Derajat desentralisasi

$X_4$  = Rasio efisiensi

$X_5$  = Rasio pertumbuhan

$X_6$  = Rasio efektivitas

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-0.122	0.074		1.641	0.101	
Kem Keuangan Daerah	0.484	0.055	0.814	8.846	0.000	Hipotesis ditolak
LN Derajat Desentralisasi	-0.063	0.008	-0.696	7.475	0.000	Hipotesis diterima
LN Jumlah Penduduk	-0.018	0.003	-0.318	-7.34	0.000	Hipotesis ditolak
Rasio Efisiensi	0.257	0.049	0.193	5.297	0.000	Hipotesis diterima
Rasio Pertumbuhan	0.004	0.003	0.046	1.297	0.195	Hipotesis ditolak
Rasio Efektivitas	0.099	0.027	0.137	3.678	0.000	Hipotesis ditolak

F : 0,000  
Adjusted R<sup>2</sup> : 0,176

#### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi memiliki tujuan untuk mengukur bagaimana besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada penelitian ini dihasilkan uji koefisien determinasi pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat hasil dari uji koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* pada penelitian ini sebesar 0,176 atau 17,6%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen atau *financial distress* dapat dijelaskan sebesar 17,6% oleh variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini diantaranya kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, jumlah penduduk, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas. Sedangkan sisanya 82,4% (100%-17,6%) lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

#### Uji F

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam pengujian hipotesis, maka dilakukan uji F dengan melakukan perbandingan F hitung dengan F tabel.

**Tabel 6**  
**Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0.415	6	0.069	24.812	.000 <sup>b</sup>
Residual	1.853	665	0.003		
Total	2.267	671			

Berdasarkan Tabel 7 didapatkan nilai sig sebesar 0,000. Karena nilai tersebut kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji ini disimpulkan hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, jumlah penduduk, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas secara simultan berpengaruh terhadap *financial distress*.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap *financial distress***

Hasil uji t-Test pada variabel kemandirian keuangan daerah memberikan hasil berpengaruh signifikan positif terhadap kondisi *financial distress*. Yang artinya semakin mandiri keuangan suatu daerah, maka peluang terjadinya *financial distress* semakin tinggi. Tidak selamanya semakin tinggi PAD maka semakin tinggi total alokasi belanja modal dalam menghindari *financial distress* (Agus Tubels, 2015). Karena beberapa pemerintah daerah Kabupaten/Kota ada yang mengalokasikan anggaran tersebut untuk belanja rutin atau belanja pegawai. Dalam beberapa pemerintah daerah Kabupaten/Kota, ada yang sudah melakukan penargetan terhadap belanja modal dari PAD, namun dalam realisasi yang dilakukan tidak sesuai dengan targetan yang sudah ditetapkan.

### **Pengaruh derajat desentralisasi terhadap *financial distress***

Berdasarkan uji t-Test didapatkan hasil bahwa variabel derajat desentralisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress* sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya secara parsial derajat desentralisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*. Kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah akan mempengaruhi suatu daerah akan mengalami *financial distress* atau tidak. Semakin optimal kontribusi PAD dalam total pendapatan maka hal tersebut juga menunjukkan peningkatan kebijakan dan kemampuan yang dilakukan oleh suatu daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

### **Pengaruh jumlah penduduk terhadap *financial distress***

Berdasarkan hasil uji t-Test didapatkan hasil bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap kondisi *financial distress* di Indonesia. Karena jumlah penduduk menggambarkan sumber daya yang dimiliki suatu daerah sehingga dapat menyokong pendapatan daerah tersebut (Syurmita, 2014) dan terjadinya *financial distress* akan semakin kecil.

### **Pengaruh rasio efisiensi terhadap *financial distress***

Berdasarkan hasil uji t-Test, didapatkan hasil bahwa variabel rasio efisiensi berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*. Tingkat rasio efisiensi tidak bisa memberikan gambaran *financial distress* secara langsung karena pada beberapa kasus yang terjadi di pemerintah daerah menunjukkan rasio efisiensi berada pada kisaran atau kondisi efisien, namun kondisi *financial distress* tetap tinggi maka rasio efisiensi tidak bisa menggambarkan alokasi belanja modal secara langsung karena alokasi pada belanja daerah lebih besar untuk belanja pegawai sehingga menyebabkan tumpang tindih pendanaan pada sebuah kegiatan sehingga banyak pelayanan publik diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan publik yang sesungguhnya.

### **Pengaruh rasio pertumbuhan terhadap *financial distress***

Berdasarkan uji t-Test didapatkan hasil bahwa variabel rasio pertumbuhan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap *financial distress*. Rasio pertumbuhan yang

mengalami arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio pertumbuhan, maka tingkat terjadinya *financial distress* juga akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahayu & Sopian (2017) yang menghasilkan bahwa rasio pertumbuhan dari pendapatan daerah (PAD) yang semakin tinggi akan memberikan kinerja keuangan yang bagus, namun dapat diperhatikan kalau PAD yang tinggi maka akan memiliki biaya atau beban yang juga tinggi. Karena pendapatan yang besar belum tentu memiliki beban yang sedikit dan kemungkinan *financial distress* dapat terjadi.

### **Pengaruh rasio efektivitas terhadap *financial distress*.**

Hasil uji t-Test menunjukkan bahwa rasio efektivitas dalam penelitian ini mempengaruhi secara signifikan positif terhadap *financial distress*. Realisasi PAD tidak bisa secara langsung menggambarkan pendapatan daerah tersebut dalam pengalokasian belanja modal (Rasuli & Silfi, 2013). Realisasi PAD lebih banyak digunakan dalam menutupi biaya yang telah dikeluarkan saat mendapatkan PAD itu sendiri dan lebih banyak digunakan terhadap biaya operasional dan belanja pegawai.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang menjadi patokan dalam menilai kemandirian keuangan daerah, belum bisa dijadikan tolak ukur alokasi untuk belanja modal menjadi optimal dan terhindar dari *financial distress*.
- b. Derajat desentralisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah yang bergantung terhadap dana pemerintah pusat akan cenderung mengalami *financial distress*.
- c. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan kalau jumlah penduduk menggambarkan sumber daya yang dimiliki suatu daerah sehingga dapat menyokong pendapatan daerah tersebut.
- d. Rasio efisiensi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap *financial distress*. Hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah yang besar akan menyebabkan alokasi belanja modal menjadi kecil dan terjadinya *financial distress*.
- e. Rasio pertumbuhan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap *financial distress*. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan dari pendapatan daerah (PAD) yang semakin tinggi akan memberikan kinerja keuangan yang bagus, namun PAD yang tinggi akan memiliki biaya atau beban yang juga tinggi. Karena pendapatan yang besar belum tentu memiliki beban yang sedikit.
- f. Rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD dalam perhitungan rasio efektivitas lebih banyak digunakan dalam menutupi biaya yang telah dikeluarkan saat mendapatkan PAD itu sendiri dan lebih banyak digunakan terhadap biaya operasional dan belanja pegawai.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Penelitian selanjutnya disarankan meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi *financial distress* menggunakan variabel independen yang lain dari yang digunakan penelitian ini karena kontribusi variabel lain sebesar 82,4%.

- b. Penggunaan faktor keuangan sebagai variabel independen, disarankan mencari faktor keuangan yang mempengaruhi *financial distress* secara langsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, V., Merpaung, E., & Pratama, D. (2017). Analisa Rasio Keuangan dalam Memprediksi Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Maratha*, 2598- 4977.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. D. (2006). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1*
- Halim, A., & Abdullah, S. (2015). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 53-64.
- Lazyra, K. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIK YKPN.
- Mastuti, F., Saifi, M., & Azizah, D. F. (2013). Altman Z-Score Sebagai Salah Satu Metode dalam Menganalisis Estimasi Kebangkrutan Perusahaan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2. (2015). *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019*.
- Rahayu, W. P., & Sopian, D. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress. *Jurnal UMT*.
- Rukmana, W. V. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Kepulauan Riau. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*.
- Sartika, D. (2016). Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia periode 2011-2013. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syurmita. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi Financial Distress. *Konferensi Regional Akuntansi (KRA) Dan Doktoral Kolokium*.
- Tubels, A. (2015). Evaluasi Financial Distress Pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung. *Skripsi*.
- Umar, H. (2003). *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wulandari, Y., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.